

RINGKASAN BERITA HARI INI

92 Ribu Warga Tidak Mampu Terima Bantuan Beras 10 Kg

Saluran Tiga Bulan

Saluran Tiga Bulan

Saluran Tiga Bulan

Salurkan BLT Senilai Rp 11 Miliar

Untuk 3 Ribu Buruh

TANJUNGPINANG, Gelandang, 12 April 2023. Bupati Sidoarjo, H. Saiful Hidayat, telah menyetujui alokasi anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk 3.000 buruh pabrik rokok.

Soal Pokir Rp 123 M. Ketua Dewan Siap Panggil Anggota Nakal

ABDULLAH Azwar Anas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, siap memanggil anggota Dewan yang dianggap melanggar disiplin.

Tak Ada Saluran Air

Saluran air di Desa Mamburjo, Kecamatan Mamburjo, Kabupaten Sidoarjo, mengalami gangguan.

Belajar dari YouTube, Pesanan Layang-Layang Melesat

Saluran air di Desa Mamburjo, Kecamatan Mamburjo, Kabupaten Sidoarjo, mengalami gangguan.

Sebanyak 2.688 Siswa Diprediksi Sekolah di Luar atau Pongpes

Saluran air di Desa Mamburjo, Kecamatan Mamburjo, Kabupaten Sidoarjo, mengalami gangguan.

MITRA

ASN Perlu Punya Usaha Sampingan

PEKERJAAN sampingan bagi seorang ASN saat ini dianggap perlu, karena akan bisa digunakan sebagai pencaharian lain, untuk menambah kesejahteraan mereka.

Tenaga Honorer Dihapus November 2023, Menpan RB Janji Tidak Ada PHK Massal

Sambutan Hal 1

Hal 1

IQ di Atas 120 Masuk Kelas Khusus Cerdas Istimewa

Hal 2

MI Ma'arif Ketegap Pilot Project Implementasi Kurikulum Merdeka

Hal 3

By Name by Address

Hal 4

Pemkab Bantu 92 Ribu Warga Tidak Mampu Terima Bantuan Beras 10 Kg

Hal 5

Sidoarjo, Memorandum

Penyusunan bantuan pangan bagi 92.000 warga tidak mampu di Kabupaten Sidoarjo ditarget Bupati Saiful Hidayat 1444 Hijirol.

Jelang Lebaran Harga Cabai Turun

Saluran air di Desa Mamburjo, Kecamatan Mamburjo, Kabupaten Sidoarjo, mengalami gangguan.

Tenaga Honorer Dihapus November 2023, Menpan RB Janji Tidak Ada PHK Massal

Hal 6

Jelang Lebaran Harga Cabai Turun

Saluran air di Desa Mamburjo, Kecamatan Mamburjo, Kabupaten Sidoarjo, mengalami gangguan.

Tenaga Honorer Dihapus November 2023, Menpan RB Janji Tidak Ada PHK Massal

Hal 7

By Name by Address

Hal 8



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pimpinan RS Bunda Mangkir Saat Hearing dengan Komisi D, Ada Apa ?



SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – [Komisi D DPRD Sidoarjo](#) mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo untuk bersikap tegas pada [RS Bunda Waru](#) atas buruknya kualitas layanan terhadap pasiennya hingga menyebabkan kematian.

“Harus diberi sanksi. Soal bentuknya tergantung aturan dan mekanisme yang berlaku di Dinkes,” tandas Ketua [Komisi D DPRD Sidoarjo](#), Abdillah Nasikh yang ditemui usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing terkait kasus itu, Rabu (12/04/2023) pagi siang tadi.

Apalagi berdasarkan informasi dari Kepala Desa Pranti, Eko Purnomo, ternyata kasus semacam ini bukan yang pertama kali terjadi. Cukup banyak warga yang merasa kurang puas dengan layanan rumah sakit yang berlokasi di Jl Raya Kundi No 70, Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru itu.

Sayangnya pihak [RS Bunda](#) tidak mengirimkan salah satu pimpinan maupun stafnya dalam forum yang dihadiri perangkat desa Pranti, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sidoarjo, Dinkes serta dua orang keluarga almarhum Teguh.

Menurutnya, kasus ini hendaknya dijadikan momentum bagi Dinkes Sidoarjo untuk lebih proaktif dalam melakukan pembinaan pada fasilitas-fasilitas kesehatan, khususnya milik swasta, di semua level. Mulai tingkat klinik hingga rumah sakit. Untuk mengimbangi langkah Dinkes tersebut, komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial tersebut berencana mengundang semua pimpinan rumah sakit swasta di kota delta untuk memastikan komitmen fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan terbaik pada publik.



"Kualitas layanan ini sangat krusial karena menyangkut nyawa seseorang. Dan itu yang akan kami pastikan setelah adanya kasus [RS Bunda](#) ini. Insyaallah setelah Lebaran akan kami kumpulkan," imbuh Abdillah Nasih yang didampingi anggota [Komisi D](#) lainnya, Bangun Winarso dan Thoriqul Huda.

Ia menambahkan, upaya meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan itu merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkompeten dengan hal tersebut. Baik dari kalangan eksekutif, legislatif maupun unsur swasta.

Nasih menduga, buruknya kualitas layanan pada [pasien](#) ini yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak cairnya Dana Insentif Daerah (DID) bidang kesehatan dari Pemerintah pusat ke Kabupaten Sidoarjo di tahun anggaran 2023 ini.

"Saya berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk segera melakukan pembenahan secara menyeluruh agar jangan terulang lagi di kemudian hari. Baik di [RS Bunda](#) maupun rumah sakit lainnya di Sidoarjo," tutup legislator yang berangkat dari kecamatan Waru itu.

Kasus yang ramai diberitakan di berbagai media massa itu bermula saat Sri Sutami membawa orang tuanya, alm Teguh ke [RS Bunda](#) pada 8 Maret 2023 lalu, sekitar pukul 23.15 WIB. warga Jalan Manggis, Desa Pranti, Kecamatan [Sedati](#) itu mengeluh sakit di bagian perut dan pinggang belakang setelah mengkonsumsi obat dengan menggunakan air kopi.

Saat itu Sri mengaku mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan dari petugas media di ruang IGD rumah sakit bertipe C itu sekalipun ia tak menggunakan BPJS-nya dan berstatus [pasien](#) umum supaya bisa mendapatkan layanan lebih cepat.

Setelah memberikan suntikan, dokter yang bertugas menyatakan [pasien](#) bisa langsung dibawa pulang dan menjalani rawat jalan sekalipun kondisinya belum stabil. Namun Sri bersikeras tetap tinggal disana lantaran [pasien](#) masih terus gelisah.

Sekitar pukul 00.30 WIB, [pasien](#) mengalami gagal nafas. Dan baru saat itu, lanjut Sri, orang tuanya itu mendapatkan tindakan medis. Namun 10 menit kemudian pria berusia 67 tahun tersebut menghembuskan nafas terakhirnya.

Sementara itu Kades Pranti mengatakan, ia sempat menemui jajaran Direksi RS untuk mempertanyakan masalah yang dilaporkan warganya tersebut. Termasuk tindakan uji lab, pemberian cairan infus maupun bantuan pernafasan yang sama sekali tak diberikan pada [pasien](#).

Saat itu pihak rumah sakit minta waktu untuk dapat menjawab apa yang menjadi keluhan keluarga. "Setelah itu kami dimintai nomor telpon dan pulang. Tapi sampai saat ini tidak ada kabar sama sekali dari pihak rumah sakit. Bahkan saya telpon pun tidak diangkat," paparnya. (Wiwid)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Didampingi Ketua DPRD, Bupati Sidoarjo Gelontor BLT Untuk 3.383 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo

Sidoarjo - Menjelang lebaran hari raya idul fitri 1444 H Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menggelontorkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada ribuan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo. Mereka yang tercatat sebagai penerima BLT itu berasal dari 53 pabrik rokok yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Total jumlah penerima BLT sebanyak 3.383 buruh.

Bantuan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT tahun 2023. Nominalnya Rp. 275 ribu/bulan. Rincian BLT yang diberikan mulai Januari, Februari dan Maret dengan total Rp. 825 ribu. Rabu (12/4/2023) BLT secara simbolis diserahkan langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kepada para buruh pabrik rokok Cengkir Mas Tanggulangin, Rabu (12/4/2023).

Selain buruh pabrik rokok, bantuan tersebut juga diserahkan kepada 154 orang penerima non produksi pabrik rokok. Anggaran yang digelontorkan kurang lebih mencapai Rp. 11 milyar.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan bantuan seperti ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Bantuan tersebut kata Gus Muhdlor menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan warga. Dikatakannya terdapat kenaikan penerima bantuan dari tahun



sebelumnya. Dari 2 ribuan orang, kini sudah mencapai 3 ribu orang. "Semoga bantuan ini bisa meringankan beban panjenengan semua,"ucapnya.

Putra KH. Agoes Ali Masyhuri pengasuh ponpes Progresif Bumi Sholawat itu mengatakan, upaya Pemkab Sidoarjo mensejahterakan warganya tidak hanya dilakukan melalui bantuan saja. Lebih dari itu, pelatihan menjadi pengusaha baru juga terus dilakukan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo. Seperti halnya pelatihan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok agar memiliki keterampilan kerja lainnya.

"Lewat Disnaker juga kita sertakan pelatihan untuk buruh rokok sehingga lebih produktif agar menjadi seorang entrepreneur dirumah masing-masing,"ujarnya.

Menurut bupati muda itu, bentuk keberpihakan pemerintah juga diberikan kepada industri rokok. Keberpihakan itu untuk menjaga ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau tersebut.

Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah membuat Kawasan Industri Hasil Tembakau/KIHT. Tempatnya di wilayah Kecamatan Porong. Tempat tersebut menjadi wadah pengusaha rokok untuk lebih tenang menjalankan bisnisnya.

"Keberpihakan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penggunaan DBHCHT sangat masif, termasuk komitmen kita untuk membangun KIHT di kawasan Porong yang akan mewadahi pengusaha-pengusaha rokok agar lebih tertib dan aman menjalankan usahanya,"ucapnya. (git/ir/im)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Sidoarjo, *Kharismanews.id* – Menjelang lebaran hari raya idul fitri 1444 H Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menggelontorkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada ribuan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo. Mereka yang tercatat sebagai penerima BLT itu berasal dari 53 pabrik rokok yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Total jumlah penerima BLT sebanyak 3.383 buruh.

Bantuan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT tahun 2023. Nominalnya Rp. 275 ribu/bulan. Rincian BLT yang diberikan mulai Januari, Februari dan Maret dengan total Rp. 825 ribu. Rabu (12/4/2023) BLT secara simbolis diserahkan langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kepada para buruh pabrik rokok Cengkir Mas Tanggulangin, Rabu (12/4/2023).

Selain buruh pabrik rokok, bantuan tersebut juga diserahkan kepada 154 orang penerima non produksi pabrik rokok. Anggaran yang digelontorkan kurang lebih mencapai Rp. 11 milyar.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan bantuan seperti ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Bantuan tersebut kata Gus Muhdlor menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan warga. Dikatakannya terdapat kenaikan penerima bantuan dari tahun sebelumnya. Dari 2 ribuan orang, kini sudah mencapai 3 ribu orang.

Media online Nasional
KHARISMANEWS.id

Profesional - Independen - Kompeten

"Semoga bantuan ini bisa meringankan beban penjenengan semua,"ucapnya.

Putra KH. Agoes Ali Masyhuri pengasuh ponpes Progresif Bumi Sholawat itu mengatakan, upaya Pemkab Sidoarjo mensejahterakan warganya tidak hanya dilakukan melalui bantuan saja. Lebih dari itu, pelatihan menjadi pengusaha baru juga terus dilakukan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo. Seperti halnya pelatihan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok agar memiliki keterampilan kerja lainnya.

"Lewat Disnaker juga kita sertakan pelatihan untuk buruh rokok sehingga lebih produktif agar menjadi seorang entrepreneur dirumah masing-masing,"ujarnya.

Menurut bupati muda itu, bentuk keberpihakan pemerintah juga diberikan kepada industri rokok. Keberpihakan itu untuk menjaga ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau tersebut.

Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah membuat Kawasan Industri Hasil Tembakau/KIHT. Tempatnya di wilayah Kecamatan Porong. Tempat tersebut menjadi wadah pengusaha rokok untuk lebih tenang menjalankan bisnisnya.

"Keberpihakan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penggunaan DBHCHT sangat masif, termasuk komitmen kita untuk membangun KIHT di kawasan Porong yang akan mewadahi pengusaha-pengusaha rokok agar lebih tertib dan aman menjalankan usahanya,"ucapnya. (Sund/git/ir)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kharisma Media Online > Blog > Warta Daerah > Kabar Sidoarjo > Jelang Lebaran, Gus Muhdlor Gelontor BLT Untuk 3.383 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo

LAUNCHING PENERIMAAN BAN SOS BLT DAN BAHAS, CUKAIHATI, L

KABAR SIDOARJO WARTA DAERAH

📍 Jelang Lebaran, Gus Muhdlor Gelontor BLT Untuk 3.383 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo

Media online Kharismanews.id - Published 12/04/2023
Last updated: 2023/04/12 at 7:29 PM

Share f t e

Media Online Nasional
KHARISMANEWS.id
Profesional - Independen - Kompeten



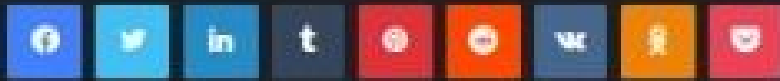
INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi D DPRD Sidoarjo Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa

bid'ic • 3 jam ago

0 15 1 minute read



DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Ketua
H. Usman, M. Kes

Wakil Ketua
Bambang Riyoko, SE

Wakil Ketua
Kayah, SH

Wakil Ketua
Dr. H. Erni Firdaus, ST, MM



Para wakil rakyat di Komisi D yakni Bangun Winarso, Adit Nindyatman dari partai PKS, dan Ainun Jariyah dari partai PKB menerima para mahasiswa tersebut dengan duduk lesehan santai di depan gedung DPRD setempat (3/4)// Foto: yah



SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Sejumlah mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sidoarjo berunjuk rasa di halaman kantor DPRD kabupaten Sidoarjo, Senin (3/4/2023) pukul 10.00 wib.

Para mahasiswa menuntut ketua DPRD untuk menandatangani petisi yang poinnya ketua DPR, harus menyampaikan kepada pihak terkait agar UU Cipta Kerja dicabut atau di batalkan.

Para wakil rakyat di Komisi D yakni Bangun Winarso, Adit Nindiyatman dari partai PKS, dan Ainun Jariyah dari partai PKB menerima para mahasiswa tersebut dengan duduk lesehan santai di depan gedung DPRD setempat.

Dalam suasana santai dengan penuh keakraban Bangun Winarso menjelaskan, kalau semua yang disampaikan oleh para mahasiswa nanti akan di sampaikan ke ketua DPR dulu, karena semua kegiatan ketua maupun anggota dewan sudah terjadwalkan.

"Sekarang pak ketua dewan sedang ada kegiatan lain yang sudah terjadwalkan. Aspirasi yang disampaikan adik – adik nanti saya sampaikan ke pak ketua dewan dulu," pungkas Bangun Winarso.

Mendengar penjelasan anggota dewan komisi D yang santai dan penuh keakraban, para mahasiswa alhimya suasananya dingin dan membubarkan diri. (Adv)

Laporan: yah

Editor: Budi Santoso





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Pemkab Bantu 92 Ribu Warga Tidak Mampu Terima Bantuan Beras 10 Kg

Sidoarjo, Pojok Kiri

Program bantuan pangan pemerintah pusat mulai disalurkan Pemkab Sidoarjo kepada masyarakat Sidoarjo. Terdapat 276 ribu kantong beras kemasan 10 kg yang siap didistribusikan. Ada 92 ribu masyarakat tidak mampu yang akan memperolehnya. Masing-masing akan menerima 10 kg beras selama tiga bulan.

Selasa, (11/4), bantuan pangan tersebut mulai ditribusikan. Penyaluran pertama dilakukan di empat desa di Kecamatan Balongbendo. Diantaranya Desa Seketi, Desa Kemangsen serta Desa Penambangan dan Desa Sumokembangsri. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sendiri yang menyerahkannya.

Bupati Ahmad Muhdlor memastikan bantuan pangan tersebut tuntas disalurkan sebelum hari raya idul fitri. Mayoritas penerimanya merupakan penerima manfaat PKH dan BPNT. Datanya by name by addres dari Kementerian Sosial RI. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 92 ribu orang yang akan menerimanya. Mereka akan memperoleh 10 kg beras selama tiga bulan berturut-turut.

Putra pengasuh Ponpes



Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor saat membagikan beras 10 kg pada masyarakat

Progresif Bumi Sholawat KH. Agoes Ali Masyhuri itu meminta bantuan pangan tersebut diberikan kepada yang berhak. Ia tidak ingin mendengar bantuan tersebut salah sasaran. Dengan kata lain tidak sesuai dengan data penerima bantuan yang telah ditentukan. Oleh karenanya ia mewantiwanti pemerintah desa untuk mendistribusikannya dengan baik.

"Saya minta tolong kepada pak Kades beserta perangkat harus memberikan jaminan bantuan tersebut diberikan kepada yang berhak, titik, jangan sampai ada isu diberikan keponakannya, ada isu diberikan adiknya pak RT, ini adalah program pemerintah

pusat yang turun by name by addres,"sampainya saat menyerahkan bantuan pangan di balai Desa Kemangseng.

Gus Muhdlor berharap semua pihak mendukung program bantuan pangan kali ini. Ia meminta semua pihak saling mengawasi penyaluran bantuan pangan tersebut. Dengan begitu ia yakin program bantuan pangan seperti ini akan tepat sasaran.

"Ini semua tidak akan berhasil kalau semua tidak saling mengawasi, pak Kades, BPD, LPMD, RT RW harus saling mengawasi, 532 ini (beras bantuan pangan kepada warga Desa Kemangsen) harus turun kepada yang berhak,"pintanya. (Khol/ ADV)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO



Ketua
H. Usman, M.Kes

Wakil Ketua
Bambang Riyoko, SE

Wakil Ketua
Kayan, SH

Wakil Ketua
Dr. H. Ernir Firdaus ST., MM

DPRD Sidoarjo Dukung Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Program Ketahanan Pangan



BAMBANG PUJIANTO

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo,

Sidoarjo - Pojok Kiri

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, H. Bambang Pujiyanto mendukung sepenuhnya program ketahanan pangan di kabupaten Sidoarjo dengan pemanfaatan lahan kosong pekarangan rumah. Menurut politikus Gerindra saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 6/4/23 terkait program pemanfaatan lahan kosong pekarangan rumah untuk ditanami guna memperkuat ketahanan pangan khususnya oleh ibu-ibu PKK Kabupaten Sidoarjo dan umumnya masyarakat Sidoarjo, ia sangat mendukung sekali program itu, mengingat lahan hijau di Sidoarjo tinggal sebagian oleh karenanya kita harus kreatif untuk membuat ketahanan pangan melalui lahan kosong pekarangan rumah tangga, ucapnya.

Begitu pula disampaikan oleh anggota komisi B DPRD Sidoarjo, Denny Haryanto melihat pentingnya ketahanan

pangan kita harus punya kreativitas memanfaatkan lahan kosong pekarangan rumah untuk ditanami apa saja yang bernilai ekonomis, Tuturnya. S dang Agil anggota komisi B mensupport program ketahanan pangan melalui media pemanfaatan lahan kosong pekarangan rumah dengan ditanami verti culture untuk menghasilkan nilai ekonomi untuk ketahanan pangan keluarga, Katanya. Sementara kalau bercermin dari kondisi pandemi Covid19 beberapa tahun lalu.

Banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi bahan pangannya sendiri. Fakta ini yang mendorong anggota DPRD Sidoarjo mendukung program ketahanan pangan pemerintah untuk memanfaatkan lahan kosong pekarangan rumah untuk didayafungsikan menjadi ketahanan pangan yang bernilai ekonomis guna menopang perekonomian masyarakat, Ujar ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman MKes saat dikonfirmasi wartawan terkait proyek ketahanan pangan dengan pemanfaatan lahan kosong pekarangan rumah, Senin 10/4/23.

Politikus PKB besutan Gus Dur ini menambahkan guna menopang perekonomian keluarga seorang ibu harus kreatif melihat kesempatan yang ada, misal



DENNY HARYANTO

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo

ada pekarangan yang kosong itu harus difungsikan dengan ditanami pelbagai tanaman yang bisa menopang perekonomian keluarga, Tutar Abah Usman legislator yang selalu smile ini. Sedangkan TP-PKK Kabupaten Sidoarjo untuk mensukseskan Ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan pekarangan keluarga, ia langsung menggelar sosialisasi. Diharapkan lewat sosialisasi tersebut anggotanya dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri

Acara sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan keluarga yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Gedangan tersebut dibuka langsung Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Sa'adah Muhdlor S. Hum, beberapa hari yang lalu. Kegiatan itu dihadiri Camat Gedangan serta perwakilan TP PKK desa Se-Kecamatan Gedangan. Dalam sosialisasi tersebut dihadirkan narasumber dari Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo. (Khol/ADV)



POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Dari Hobi Jadi Bisnis

Belajar dari YouTube, Pesanan Layang-Layang Melesat

Dengan ketekunan dan kesabaran, hobi dapat menjadi sumber penghasilan. Seperti yang dilakukan oleh Khoirul Anam. Hobinya dalam membuat layang-layang sekarang dapat menambah penghasilannya. Terutama pada musim kemarau, pesanan layangan semakin banyak.

ANNISA FIRDAUSI, Wartawan Radar Sidoarjo

PRIA yang tinggal di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan tersebut menggunakan plastik warna-warni dalam mengkreasikan layang-layangnya. Plastik-plastik itu dipasang di kerangka yang terbuat dari bambu.

Agar plastik dapat melekat dengan kuat, Anam merekatkannya dengan cara menyolder dan lem. Untuk solderannya harus ekstra hati-hati, agar plastik tidak

berlubang. "Jika berlubang, layangan tidak akan terlihat cantik," katanya.

Menurut Anam, setiap orang bisa membuat layang-layang, tetapi untuk membuat motifnya tidak semua orang bisa. Hal ini membutuhkan ketekunan, ketelatenan, dan jiwa seni. Sehingga gambar yang dituangkan ke layang-layang menjadi sangat indah.

Anam mengatakan, hobi bermain layang-layangnya



KREATIF: Khoirul Anam menunjukkan salah satu layang-layang yang merupakan hasil kreasinya.

dimulai pada 2019. Pada awalnya, dia tidak bisa membuat layang-layang sama sekali. Selama enam bulan, dia selalu gagal.

Untuk memudahkan pembuatan layang-layang, dia belajar dari YouTube. Meski begitu, tetap tidak semudah yang dilihat. Layang-layang yang dibuat masih tidak dapat terbang. Namun, Anam tidak putus asa.

Dari kegagalan demi kegagalan, Anam belajar bagaimana membuat layang-layang yang dapat terbang. Menurutnya, kunci utama layangan dapat terbang atau tidak adalah dari sayapnya.

Selama ini, setiap kali membuat layang-layang, Anam lebih memilih

• Ke Halaman 10



Belajar dari YouTube,...

bambu jenis ori atau bambu duri.

Setelah mahir membuat layang-layang, pesanan pun datang. Harga yang dipatok berkisar antara Rp 150 ribu hingga Rp 500 ribu tergantung ukuran dan motifnya. "Semakin besar dan sulit motifnya, harganya semakin mahal," ujarnya.

Menurut Anam, rata-rata layang-layang yang dibuat memiliki ukuran 2

hingga 3 meter. Jika melebihi tiga meter dikhawatirkan tidak bisa terbang.

Pada tahun 2020, banyak orang yang bermain layang-layang. Mungkin karena pandemi, sehingga orang harus bekerja dari rumah dan tidak bisa keluar rumah.

Hampir setiap daerah sedang booming layang-layang. Sejak saat itu hingga sekarang, setiap bulan pasti ada pesanan untuk membuat layangan. (*vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Salurkan BLT Senilai...

per bulan. Sehingga total anggarannya mencapai Rp 11 miliar.

Bantuan tersebut mulai diberikan sejak Januari hingga Maret lalu.

“Yang terpenting bahwa, pemerintah punya atensi lebih untuk menjaga eko-

sistem yang baik, ekosistem ekonomi, sosial dan kemasyarakatan terhadap industri rokok,” kata Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor secara simbolis kepada sejumlah buruh di salah satu pabrik rokok di

kawasan Tanggulangin. Tampak pula Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir.

Muhdlor menuturkan, bantuan tersebut merupakan salah satu upaya agar seluruh pihak diuntungkan dan mendapat perhatian. Sehingga dapat berjalan tanpa mengganggu antarsatu pihak



dengan pihak yang lainnya. “Ini yang menjadi tugas kita bersama. Maka hal ini harus dikawal bersama agar dalam prosesnya dalam berjalan dengan apa yang diharapkan,” jelasnya.

Di samping itu, Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di

wilayah Kecamatan Porong. Nantinya, tempat ini akan menjadi wadah bagi para pengusaha rokok agar. “Akan mewadahi para pengusaha rokok agar lebih tertib lagi dan aman menjalankan usahanya,” terangnya. (far/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Salurkan BLT Senilai Rp 11 Miliar

Untuk 3 Ribu Buruh Pabrik Rokok

TANGGULANGIN-Sebanyak 3.383 buruh pabrik rokok dan 153 penyokongnya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Rabu (12/4). Para penerima BLT tersebut berasal 53 pabrik rokok yang ada di Sidoarjo.

Bantuan itu berasal dari

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023. Jumlah buruh penerima BLT tahun ini meningkat drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022 jumlah buruh rokok penerima BLT hanya sekitar 2.996 orang.

Nominal BLT yang diterima para buruh pabrik rokok tersebut mencapai Rp 275 ribu

● Ke Halaman 10



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

SIMBOLIS: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menyerahkan BLT kepada perwakilan buruh pabrik rokok.

IST



TUNGGU PEMBELI: Salah satu pedagang cabai dan bahan pokok lainnya di Pasar Larangan.

LUKMAN ALFARIS/RADAR SIDOARJO

Jelang Lebaran Harga Cabai Turun

KOTA-Sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di Sidoarjo

terpantau stabil. Meski ada beberapa yang mengalami kenaikan, tetapi ada juga yang me-

ngalami penurunan. Kalangan legislatif meminta Pemkab Sidoarjo untuk mempertahankan harga bahan pokok hingga mendekati Lebaran nanti.

Menurut pantauan di Pasar Larangan dan Pasar Krian, Rabu (12/4), harga cabai pekan ini cenderung mengalami penurunan. Seperti cabai merah keriting yang semula harganya Rp 35 ribu per kg kini menjadi

Rp 30 ribu per kg.

Begitu juga dengan cabai merah yang harganya turun menjadi Rp 27 ribu per kg dari Rp 30 ribu per kg. Namun ada juga jenis cabai yang mengalami peningkatan harga. Cabai rawit harganya naik sedikit dari Rp 26 ribu per kg menjadi Rp 27 ribu per kg. Begitu juga dengan harga bawang

● Ke Halaman 10



Jelang Lebaran...

merah yang semula Rp 31 ribu per kg menjadi Rp 32 ribu per kg. Bawang putih meningkat dari Rp 25 ribu menjadi Rp 27 ribu per kg.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Deny Haryanto menyebutkan, stabilitas harga bahan pokok menjelang Lebaran ini harus dipertahankan. Meski begitu, dirinya memprediksi bahwa harga

cabai akan naik saat mendekati Lebaran. "Hal itu terjadi karena tingginya permintaan dari konsumen yang ingin memasak berbagai hidangan saat Hari Raya," katanya.

Dirinya menyarankan agar Pemkab Sidoarjo terus meningkatkan sinergitas lintas sektor untuk meminimalisir dan mengantisipasi penimbunan-penimbunan yang akan terjadi. Misalnya, dengan bekerja sama dan berkoordinasi

dengan Satgas Pangan. "Serta memastikan pasokannya aman," ujarnya.

Menurut dia, yang tidak kalah penting adalah dinas terkait juga harus terus memastikan fluktuasi harga. Sebab sudah menjadi hukum ekonomi jika permintaan meningkat otomatis harga juga ikut naik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan rutin menggelar sidak untuk melihat ketercukupan stok. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sebanyak 2.688 Siswa Diprediksi Sekolah di Luar atau Ponpes

KOTA-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo mulai menggelar sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di SMPN 4 Sidoarjo, Rabu (12/4). Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Kepala Dispendikbud Sidoarjo Tirta Adi mengatakan, ada sejumlah persyaratan dalam PPDB di semua jenjang. Jenjang SD misalnya, calon peserta didik baru harus berusia tujuh tahun. Paling rendah enam tahun pada 1 Juli tahun berjalan.

"Dapat dikecualikan menjadi paling rendah lima tahun enam bulan bagi calon

peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa," ujarnya.

Selain itu, terdapat kesiapan psikis yang dibuktikan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Kepala TK/RA asal. Sementara untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan.

"Tentu calon peserta didik baru untuk jenjang SMP Negeri atau Swasta harus sudah menyelesaikan kelas VI SD atau sederajat," imbuhnya.

Tirta menjelaskan, ada sebanyak 46 lembaga untuk SMP Negeri dan 143 untuk SMP Swasta. Rombongan belajar (rombel) SMP Negeri berjumlah 421 dengan daya

tampung sebesar 39,07 persen atau 13.480 orang.

Sementara rombel SMP Swasta berjumlah 401 dengan daya tampung 32,73 persen atau 11.294 orang. Sedangkan di MTs Negeri dan Swasta, terdapat 71 lembaga dengan jumlah Rombel 220. Daya tampung sebesar 19,78 persen atau 7.040 orang.

Namun begitu, di tahun ini SMPN 2 Prambon menerima sebanyak lima Rombel. "Di sisi lain pada 2022/2023 untuk MTs Negeri dan Swasta hanya terpenuhi 6.531 siswa atau 97 persen," jelasnya.

Tirta menyebut, jumlah seluruh siswa yang dapat ditampung di SMP dan MTs baik negeri maupun swasta



LUKMAN ALFANSUR/RADAR SIDOARJO

PERSIAPAN: Ratusan kepala sekolah se-Sidoarjo di seluruh jenjang saat mengikuti sosialisasi PPDB.

di 2023/2024 ini sebanyak 31.814 orang. Artinya ada sekitar 92 persen dari banyak lulusan. "Artinya, di-

prediksi sebanyak 2.688 orang bersekolah di luar Sidoarjo atau pondok pesantren," terangnya. (far/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

MI Ma'arif Ketegan *Pilot Project* Implementasi Kurikulum Merdeka

Sidoarjo, Bhirawa

Kurikulum Merdeka telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Riset dan Kebudayaan (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim Februari 2022 lalu. Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Agama nomor 347 Tahun 2022 tentang kurikulum merdeka, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ketegan (MIMAKET) mendaftar dan terpilih sebagai sekolah pilot project kurikulum merdeka.

Ketua Yayasan MI Ma'arif Ketegan, H. Bisri Mustofa, S.H. menjelaskan prestasi yang diraihinya tersebut sebagai suatu kehormatan, kebanggaan yang luar biasa bagi Badan Pelaksana Pendidikan Madrasah Nahdlatul Ulama (BPPMNU), NU, dan Warga Ketegan khususnya, Tanggulangin, Sidoarjo pada umumnya. Hal ini merupakan wujud konkret bahwa dari segi kualitas sejalan sejalan visi misi MIMAKET.

"Ekspektasi kami melebihi apa yang kami progreskan. Ini semua berkat doa dan dukungan dari semua pihak terkait. Terutama upaya-upaya yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terarah oleh MIMAKET," jelas Bisri Mustofa.

Lebih lanjut menurut Bisri Mustofa, pihaknya selalu mendukung

apa yang menjadi grand design MIMAKET dibawa polesan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ketegan, Tanggulangin Umi Salamah secara terarah dan berkesinambungan dengan mempertahankan nilai-nilai tradisi yang relevan.

Senada dengan hal tersebut, H. Saiful Munir, S.H. selaku Quality Assurance madrasah mengungkapkan, dirinya mengaku terkejut dengan prestasi yang diraihinya.

"Rasanya seperti tidak percaya ternyata guru-guru bisa berprestasi sedemikian rupa cepatnya. Saya sangat bangga semoga pencapaian ini bisa terus ditingkatkan dan menjadikan madrasah ini kebanggaan seluruh masyarakat Ketegan," ungkapnya dengan muka berseri.

Pengawas madrasah wilayah kecamatan Tanggulangin Dra.Khusnul Khotimah, M.M. juga bersyukur, ternyata walaupun madrasah terletak jauh dari perkotaan, bisa terpilih sebagai madrasah piloting IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka).

"Jadi, disini tidak harus madrasah yang berada di perkotaan saja. Walaupun sudah terpilih sebagai sekolah piloting IKM kami berharap bukan berarti sudah sempurna, kita tetap harus berbenah untuk menyempurnakan lagi kita saling berbagi," ungkap pengawas madrasah wilayah Tanggu-

langin tersebut.

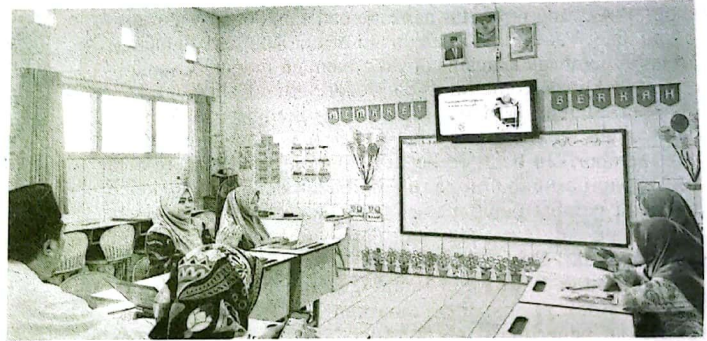
Ketika dikonfirmasi terkait prestasi tersebut, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ketegan, Tanggulangin, Umi Salamah, M.Pd.I, M.M., mengaku pihaknya sudah mempersiapkan langkah langkah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

"Pertama yakni menyiapkan gurunya. Karena sebaik apapun kurikulum dan program madrasah kalau guru tidak bisa mengimplementasikan itu mungkin it's nothing. Kita berupaya membentuk guru itu memiliki skill transformasi, kemampuan mengajar hingga mengajak siswa berpikir kritis dan melakukan problem solving," jelas Umi Salamah.

Selanjutnya, lanjut Umi Salamah pihaknya melakukan perbaikan sarana prasarana agar kurikulum merdeka bisa berjalan dengan baik.

"The important thing bagi sekolah yang akan melaksanakan kurikulum merdeka tahun depan yakni pembelajaran berbeda atau dikenal pembelajaran berdiferensiasi dan proyek," imbuh kepala madrasah yang akrab disapa Ma'am Emma itu.

Lebih lanjut Saiful Munir menambahkan, dengan terpilihnya MIMAKET sebagai madrasah piloting IKM, akan sangat berdampak pada keseriusan semua pihak dalam menyukseskan di IKM di MIMAKET. [why]



Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ketegan, Tanggulangin Umi Salamah, MPdI, MM saat menjelaskan kesiapan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka

HARIAN
Bhirawa

Media Online Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

disalurkan ada 276.000 sak beras. Masing-masing menerima beras 10 kg diberikan selama 3 bulan berturut-turut. "Penyaluran beras bagi 92.000 warga tidak mampu ini harus sudah tuntas dilakukan sebelum Idulfitri," ujar Gus Muhdlor.

Adapun data penerima bantuan pangan ini datanya didasarkan pada data penerima program PKH (program keluarga harapan) dan data BPNT (bantuan pangan nontunai).

Bahkan Gus Muhdlor dijadwalkan akan turun sendiri memantau proses penyalurannya. Hal itu dilakukan untuk memastikan dan mengawal agar penyaluran rampung sebelum Lebaran. Selain itu, ia juga memastikan agar bantuan pangan berupa beras tersebut tidak sampai salah sasaran.

Bupati juga meminta kepada dinas sosial untuk memastikan lagi dengan mengkoscek data para penerima agar tidak ada yang salah. Hal itu untuk mencegah terjadinya salah sasaran.

Selain itu, lanjut Gus Muhdlor, pengawasan bersama juga dilakukan pemerintah desa dan lembaga desa. Di antaranya BPD, LPMD, RT/RW, dibantu



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyerahkan bantuan beras kemasan 10 kg ke seorang warga terutama bagi yang kurang mampu dan membutuhkan.

dengan tokoh masyarakat. "Kami turun langsung untuk mengecek bantuan pangan sesuai dengan peruntukannya,

jangan sampai ada laporan bantuan salah sasaran," tegas bupati.

Roadshow penyalurkan

bantuan pangan pertama dengan sasaran wilayah Kecamatan Balongbendo. Penyaluran bantuan pangan

selanjutnya di wilayah Kecamatan Porong, Krembung, Tarik, Jabon, dan Kecamatan Waru. (kri/bwo/jok/nov)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Bupati Sidoarjo Targetkan Penyaluran Bantuan Pangan Tuntas sebelum Lebaran

Dibagikan untuk 92 Ribu Warga Tidak Mampu

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Sidoarjo, Memorandum

Penyaluran bantuan pangan bagi 92.000 warga tidak mampu di Kabupaten Sidoarjo ditarget Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) tuntas sebelum Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Selasa (11/4), bupati mulai menyalurkan bantuan beras dengan kemasan 10 kg tersebut. Sasaran pertama penyalurannya di wilayah Kecamatan Balongbendo. Ada empat

desa yang menerima. Yakni Desa Seketi, Desa Kemangsen, Desa Penambangan, dan Desa Sumokembangsri.

Jumlah keseluruhan bantuan pangan yang akan



Petugas menyerahkan paket sembako kepada Takmir Masjid Nurul Iman dan perwakilan guru TPQ Masjid Nurul Iman, Mojoruntut, Krembung.

IQ di Atas 120 Masuk Kelas Khusus Cerdas Istimewa

Jalur Baru PPDB SMPN

SIDOARJO - Aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN dan SDN di Sidoarjo sudah keluar. Secara umum, aturannya tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya, tahun ini ada jalur penerimaan baru. Yakni, jalur kelas khusus cerdas istimewa (KKCI).

Kemarin (12/4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo menyosialisasikan aturan PPDB ke seluruh kepala SDN dan SMPN di aula SMPN 4 Sidoarjo. Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, untuk PPDB SDN, tahun ini hanya ada dua jalur. Yakni, zonasi dengan kuota paling sedikit 70 persen dan sisanya jalur perpindahan tugas orang tua dan afirmasi (siswa tidak mampu dan siswa inklusi).

Untuk PPDB SMPN, ada enam jalur. Yakni, jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50 persen, jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30 persen, jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota paling banyak 5 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling



PERDANA: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi saat sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 4 Sidoarjo kemarin (12/4).

sedikit 15 persen, jalur kelas khusus olahraga (KKO) sebanyak satu kelas di SMPN 2 Sidoarjo, dan jalur kelas khusus cerdas istimewa (KKCI).

"Nah, KKCI ini baru tahun ini. Ini memfasilitasi siswa cerdas istimewa," kata Tirto. Jalur KKCI diperuntukkan siswa yang akan masuk satuan pendidikan penyelenggara sistem kredit semester (SPPSKS). Ada enam sekolah di Sidoarjo yang masuk kategori SPPSKS atau bisa meluluskan siswa hanya dalam

waktu dua tahun atau empat semester. Yakni, SMPN 1 Sidoarjo, SMPN 3 Sidoarjo, SMPN 5 Sidoarjo, SMPN 1 Krian, SMPN 1 Taman, dan SMPN 1 Sedati. Nah, siswa jalur KKCI itu diharapkan bisa lulus hanya dua tahun.

"Kuota KKCI ini hanya satu kelas berisi 28 siswa di tiap sekolah SPPSKS. Artinya, kuotanya 6 dikali 28 sehingga ada 168," kata Tirto. Persyaratannya, pendaftar jalur KKCI harus memiliki IQ minimal 120. "Harus ada keterangan dari lembaga

psikologi kredibel yang menjelaskan bahwa IQ-nya 120, memiliki EQ atau kecerdasan emosional, serta memiliki *task commitment* dan kreativitas," kata mantan Kadinsos tersebut.

Selain itu, pendaftar harus melampirkan nilai rapor mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS selama tiga semester. Dua semester saat kelas V dan satu semester kelas VI. "Pendaftar juga membuat surat pernyataan di atas meterai untuk sanggup ikut program KKCI," jelas Tirto.

Selain jalur KKCI, Tirto mengatakan, ada yang baru juga tahun ini. Yakni, pihaknya bakal menerima siswa yang memiliki predikat Pramuka Garuda. "Mereka bisa diterima lewat jalur prestasi sebagai penghargaan," kata Tirto. Cara mendapatkan predikat Pramuka Garuda sangat susah. Sebab, Pramuka Garuda adalah tingkat tertinggi dalam setiap golongan Pramuka. "Karena itu, perjuangan anak-anak tersebut kami hargai dan harapan kita, gerakan Pramuka di Sidoarjo semakin menggelora," ujarnya. (uzi/c7/any)

Jawa Pos

By Name by Address

PROGRAM bantuan pangan pemerintah pusat mulai disalurkan Pemkab Sidoarjo kepada masyarakat Sidoarjo. Terdapat 276 ribu kantong beras kemasan 10 kg yang siap didistribusikan.

Ada 92 ribu warga tidak mampu yang akan memperoleh. Masing-masing akan menerima 10 kg beras selama tiga bulan. Siang tadi, Selasa (11/4), bantuan pangan tersebut mulai didistribusikan.

Penyaluran pertama dilakukan di empat desa di Kecamatan Balongbendo. Di antaranya Desa Seketi, Desa Kemangsen, Desa Penambangan, dan Desa Sumokembangsri. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sendiri yang menyerahkan.

Bupati memastikan bantuan pangan tersebut tuntas disalurkan sebelum Lebaran. Mayoritas penerimanya merupakan penerima manfaat PKH

dan BPNT. Datanya *by name by address* dari Kementerian Sosial. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 92 ribu orang yang akan menerima. Mereka akan memperoleh 10 kg beras selama tiga bulan berturut-turut.

Putra pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri itu meminta bantuan pangan tersebut diberikan kepada yang berhak. Ia tidak ingin mendengar bantuan tersebut salah sasaran. Dengan kata lain tidak sesuai dengan data penerima bantuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, bupati me-wanti-wanti pemerintah desa untuk mendistribusikannya dengan baik. "Saya minta tolong kepada Pak Kades beserta perangkat harus memberikan jaminan bantuan itu diberikan kepada yang berhak, titik. Jangan sampai ada isu diberikan keponakannya, diberikan adiknya Pak RT, ini adalah program pemerintah pusat yang turun *by name by address*," tegas bupati saat menyerahkan bantuan pangan di Balai Desa Kemangsen.

Bupati yang akrab dipang-

gil Gus Muhdlor ini berharap semua pihak mendukung program bantuan pangan kali ini. Ia meminta semua pihak saling mengawasi penyaluran bantuan pangan tersebut. Dengan begitu bupati yakin program bantuan pangan seperti ini akan tepat sasaran.

"Ini semua tidak akan berhasil kalau semua tidak saling mengawasi, Pak Kades, BPD, LPMD, RT/RW harus saling mengawasi, 532 kantong beras kepada warga Desa Kemangsen harus turun kepada yang berhak," pintanya. (kri/bwo/jok/nov)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Tak Ada Saluran Air

PENGENDARA menerobos genangan air di Jalan Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, kemarin (12/4). Genangan setinggi kurang lebih 30 cm itu muncul karena tidak ada drainase di kawasan tersebut. Jika dibiarkan, jalan akan cepat rusak. (*)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

MITRA

ASN Perlu Punya Usaha Sampingan

PEKERJAAN sampingan bagi seorang ASN saat ini dianggap perlu. Karena akan bisa digunakan sebagai pemasukan lain, untuk menambah kesejahteraan mereka. Sehingga ASN tidak akan resah apabila gajinya kurang, ataupun apabila tambahan penghasilan pegawai (TPP) belum bisa dicairkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1952 tentang Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir,

➡ ke halaman 11



Achmad Zaini

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

ASN Perlu Punya Usaha Sampingan

● Sambungan hal 1

mereka memang dibolehkan bekerja sampingan, asalkan tidak sampai mengganggu tugas-tugas mereka yang ada di kantor.

Menurut Pembina Korpri Pemkab Sidoarjo, Drs Achmad Zaini MM, pekerjaan sampingan menjadi seorang wirausaha, tidak selalu langsung dengan mengeluarkan modal yang besar. Tetapi bisa juga dengan modal yang kecil lebih dulu.

“Yang penting kerja sampingan itu jelas dan pasti untungnya. Buat apa, langsung mengeluarkan biaya besar, tapi juga langsung ruginya,” ujar Zaini.

Zaini sempat memberikan ide sederhananya, yakni merintis pekerjaan sampingan dengan membuat kecambah dari kacang hijau. Dari kacang hijau menjadi kecambah yang akan dijual nanti, bila dihitung akan ada selisih keuntungannya.

Membuat kecambah ini, menurut Zaini, juga tidak terlalu sulit. Bisa dipelajari dari banyaknya media sosial saat ini. Dijual atau dipasarkan, juga sekalian bisa lewat media sosial yang ada. “Awalnya mungkin terkesan remeh. Tetapi kalau sudah lama ditekuni, bisa-bisa menjadi juragan. Sebab, omsetnya akan semakin tambah besar. Kalau ASN Pensiun, siapa tahu kerja sampingan seperti ini, nanti akan bisa menjadi pekerjaan utamanya,” lanjut pria 59 tahun itu. [kus.iib]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tenaga Honorer Dihapus November 2023, Menpan RB Janji Tidak Ada PHK Massal

● Sambungan Hal 1

Ia menjelaskan, bawa menurut Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 tahun 2014 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 pada tanggal 28 November 2023 adalah hari terakhir dan lagi tidak ada non-ASN. “Kalau ini kami terapkan, maka akan ada kegaduhan besar, karena akan ada PHK massal per-28 November,” ujarnya.

Menurutnya, jika hal tersebut tidak bisa ditangani dengan baik, maka soal penghapusan tenaga honorer bisa berpotensi menjadi masalah besar. Padahal, ia menyatakan bahwa tenaga honorer selama ini telah banyak membantu pelayanan publik. Lebih lanjut, jika terjadi PHK massal juga akan

berpotensi mengganggu pelayanan publik di daerah.

“Tentu ke depan perlu ada evaluasi serius. Pemda merekrutnya mestinya lebih bagus, sehingga jauh lebih berkualitas,” katanya. “Nah kami sedang mencari jalan tengah bersama para asosiasi dan formatnya mulai hampir ketemu, tetapi kemarin DPR memerintahkan kepada kami, sebelum tanggal 28 November kita diminta sudah ada solusi alternatif,” tambahnya.

Ke depan, kata Azwar, pihaknya akan melakukan audit terhadap sejumlah tenaga honorer dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengatasi masalah tersebut. “Supaya data yang dilaporkan kepada kami benar sesuai dengan aturan yang dikeluarkan,” pungkasnya. (*)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tenaga Honorer Dihapus November 2023, Menpan RB Janji Tidak Ada PHK Massal

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Jakarta, Pojok Kiri

Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berjanji tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dengan akan dihapusnya pegawai non-ASN atau tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.

“Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan kepada Kemenpan-RB untuk mencari jalan tengah. Oleh karena itu, kami terus berkomunikasi intensif dengan Bupati, asosiasi Wali Kota, Gubernur hingga DPR,” ucapnya saat berada di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, pada Selasa (11/4/2023).

● **Bersambung Hal 11**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Soal Pokir Rp 123 M, Ketua Dewan Siap Panggil Anggota Nakal

SIDOARJO - Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Sidoarjo mengaku kesal dengan oknum anggota DPRD Sidoarjo. Kekesalan itu disampaikan terkait arogansi oknum anggota dewan untuk mengelola jatah proyek pikir (pokok-pokok pikiran) di OPD setempat.

“Lah iya, anggota dewan kok arogan seperti itu,” ungkap Kepala OPD mengadu ke wartawan Harian Duta Masyarakat.



Ketua DPRD Sidoarjo. H. Usman, M. Kes.

DUTA

Menindaklanjuti informasi tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, M.Kes dikonfirmasi diruangannya welcome menerima pengaduan soal anggotanya. Politis PKB ini menyatakan siap dan memanggil anggota dewan Kota Delta Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan agar disiplin.

“Kalau ada anggota saya yang seperti itu. Silahkan laporkan saya. Akan saya lakukan pembinaan,”ujarnya tegas.

Informasi yang dihimpun Harian Duta Masyarakat Tahun 2023 pokir 50 anggota DPRD Sidoarjo sebesar Rp 123 miliar. Apakah benar? Usman membenarkan. Pokir sebesar itu menurutnya sangat wajar. Karena dengan kekuatan APBD Sidoarjo sebesar Rp 5 triliun, masih berapa persennya

saja. Pokir itu untuk memenuhi kebutuhan jaring aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh setiap anggota.

Sedangkan ujung tombak pelaksanaannya semua diserahkan penuh kepada setiap OPD. Regulasinya sangat jelas dan dikembalikan kepada OPD-OPD yang ada. “Bila ada anggota yang bermain-main silahkan kepala OPD mengadukan ke saya,”tegasnya.

Untuk pembagian budgeting setiap anggota dewan mengusulkan pokir Rp 2 miliar dan untuk pimpinan di atas Rp 2 miliar sesuai dengan jabatan yang disandang. Usulan jaring aspirasi masyarakat baik berupa fisik atau pelayanan publik sesuai dari Dapil (Daerah Pemilihan) masing-masing. ● dar



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Selama Tiga Bulan 92 Ribu Warga Tidak Mampu Terima Bantuan Beras 10 Kg

SIDOARJO - Program bantuan pangan pemerintah pusat mulai disalurkan Pemkab Sidoarjo kepada masyarakat Sidoarjo. Terdapat 276 ribu kantong beras kemasan 10 kg yang siap didistribusikan. Ada 92 ribu masyarakat tidak mampu yang akan memperolehnya. Masing-masing akan menerima 10 kg beras selama tiga bulan.

Selasa, (11/4/23) siang hingga Rabu (12/4/23) bantuan pangan tersebut masih didistribusikan. Penyaluran pertama dilakukan di empat desa di Kecamatan Balongbendo. Diantaranya Desa Seketi, Desa Kemangsen serta Desa Penambangan dan Desa Sumokembangsri. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sendiri yang menyerahkannya.

Bupati Ahmad Muhdlor memastikan bantuan pangan tersebut tuntas disalurkan sebelum hari raya Idul Fitri. Mayoritas penerima merupakan penerima manfaat PKH dan BPNT. Datanya by name by address dari Kementerian Sosial RI. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 92 ribu orang yang akan menerimanya. Mereka akan memperoleh 10 kg beras selama tiga bulan berturut-turut.

Putra pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat KH. Agoes Ali Masyhuri itu meminta bantuan pangan tersebut diberikan kepada yang berhak. Ia tidak ingin mendengar bantuan tersebut salah sasaran. Dengan kata lain tidak sesuai dengan data penerima



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor salurkan bantuan pangan pemerintah pusat.

bantuan yang telah ditentukan. Oleh karenanya ia mewanti-wanti pemerintah desa untuk mendistribusikannya dengan baik.

"Saya minta tolong kepada pak Kades beserta perangkat harus memberikan jaminan bantuan tersebut diberikan kepada yang

berhak, titik, jangan sampai ada isu diberikan keponakannya, ada isu diberikan adiknya pak RT, ini adalah program pemerintah pusat yang turun by name by address,"sampainya saat menyerahkan bantuan pangan di balai Desa Kemangsen.

Gus Muhdlor berharap semua pihak mendukung program bantuan pangan kali ini. Ia meminta semua pihak saling mengawasi penyaluran bantuan pangan tersebut. Dengan begitu ia yakin program bantuan pangan seperti ini akan tepat sasaran.

"Ini semua tidak akan berhasil kalau semua tidak saling mengawasi, pak Kades, BPD, LPMD, RT RW harus saling mengawasi, 532 ini (beras bantuan pangan kepada warga Desa Kemangsen) harus turun kepada yang berhak,"pintanya. ● loe

DUTA